

Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII, 1921-1939

Ayu Amalya Ma'as,* Dewi Yuliati

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah-Indonesia

*ayuamalya1004@gmail.com

Abstract

This study discusses about cultural diplomacy in Keraton Yogyakarta and Dutch Colonial Government during the reign of Sultan Hamengku Buwana VIII (HB VIII), from 1921 until 1939. Cultural aspect used as a soft political tactic that expected to accelerate keraton's aspirations, which that time is going through pressures and restrictions from colonial government. Implementation of cultural diplomacy in Keraton Yogyakarta based on various assorted friction with dutch colonial government, that in the end placing keraton in a aggrieved position. Learn from his ancestor, HB VIII during his reign use what so called a new ways to fight for the kingdom and his people's fate. Culture choosen as a medium that able to reach more stable political situation and to built in a harmonious relationship between keraton and colonial government. This case supported by effort to maximized the entire art and cultural element that exist in Keraton Yogyakarta within the sequence of cultural seremonies. All of this effort done hoping that it can be a way to objectify a paving way for HB VIII's successor to reach the throne without getting involve in political intervoention just like their ancestor in the past.

Keywords: HB VIII; cultural diplomacy; Keraton Yogyakarta.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang diplomasi kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa pemerintahan HB VIII dari 1921 sampai dengan 1939. Aspek kebudayaan dipergunakan sebagai taktik politik lunak yang diharapkan dapat melancarkan aspirasi keraton yang ketika itu mengalami tekanan dan pembatasan dari pemerintah kolonial. Pelaksanaan diplomasi kebudayaan di Keraton Yogyakarta dilandasi oleh berbagai friksi dengan Pemerintahan Kolonial Belanda, yang pada akhirnya selalu menempatkan keraton pada posisi yang dirugikan. Belajar dari sejarah para pendahulunya, HB VIII selama masa pemerintahannya menggunakan cara baru dalam memperjuangkan nasib kerajaan dan segenap rakyatnya. Kebudayaan dipilih sebagai media yang mampu mendorong tercapainya situasi politik yang stabil dan terciptanya hubungan harmonis antara keraton dan pemerintah kolonial. Hal ini didukung dengan dimaksimalkannya segenap elemen kesenian dan kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta dalam wujud rangkaian seremonial kebudayaan. Semua upaya ini dilakukan dengan harapan dapat mewujudkan jalan untuk pengganti HB VIII agar mencapai kursi tahta dengan mulus tanpa sandungan intervensi politik seperti pada masa sultan-sultan terdahulu.

Kata kunci: HB VIII; diplomasi kebudayaan; Keraton Yogyakarta.

Pendahuluan

Keraton Yogyakarta merupakan warisan dari kerajaan kuno yang berpusat di pedalaman Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Keraton Yogyakarta sebagai sentra kebudayaan Jawa yang *Adiluhung* dan klasik ini, tentu sangat menarik di tengah kemajuan zaman yang mengagungkan teknologi dan modernitas. Keraton Yogyakarta bagi masyarakat pendukungnya, diyakini sebagai orientasi atau pusat dari perkembangan kebudayaan. Di sanalah terdapat kebiasaan sehari-hari yang telah melembaga dan senantiasa diupayakan pelestariannya secara turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya (Budi, 1997: 4).

Keraton diyakini sebagai *role-model*, wadah 'digodoknya' kebudayaan-kebudayaan penuh estetika yang berbeda dengan lingkungan masyarakat biasa yang tinggal di luar keraton. Kebudayaan keraton mencakup segala aspek kehidupan seperti: bentuk arsitektur, kendaraan, pakaian atau seragam kebesaran, kesenian, laku ritual, kesusastraan hingga makanan. Kebudayaan keraton diyakini sebagai kebudayaan yang luhur karena mengandung filosofi-filosofi keyakinan hidup orang Jawa, yang berfungsi sebagai nilai-nilai panutan untuk menjalani hidup bagi orang Jawa sendiri. Fungsi tersebut diyakini dengan sepenuh hati oleh segenap masyarakat Keraton Yogyakarta. Dalam perkembangannya, berbagai bentuk kebudayaan yang berkembang dan terus dilestarikan di Keraton Yogyakarta tidak luput dari pengaruh kebudayaan yang berasal dari luar keraton. Meskipun begitu, pengaruh kebudayaan tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai budaya Jawa yang telah mengakar dengan kuat karena sarat dengan filosofi kehidupan, dan pada saat yang sama juga diliputi dengan kepercayaan akan unsur magis yang melingkupi seluruh wilayahnya.

Kebudayaan Keraton Yogyakarta tidak luput dari arus pembaratan (*westernization*) yang terjadi di Pulau Jawa. Kebudayaan yang masuk ke lingkungan keraton datang bersamaan dengan kehadiran masyarakat pendukungnya, percampuran kebudayaan merupakan hal yang mustahil dihindari. Pernyataan tersebut dapat dikorelasikan dengan pendapat Denys Lombard mengenai Mentalitas Nebula (*nébuleuses mentales*) yang mempersoalkan tentang realitas persinggungan budaya antara budaya Jawa dan budaya barat, sebagai akibat dari penerapan politik asosiasi pada awal abad ke-20 (Lombard, 2000: 9). Politik asosiasi ini berpengaruh terhadap kehidupan para elite bumiputera dalam mengadopsi nilai-nilai budaya barat, seperti yang tampak dalam aktivitas makan mereka, baik di rumah maupun dalam perhelatan jamuan makan dengan orang-orang Belanda (Rahman, 2011: 9). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jawa, khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan keraton, memiliki sikap *open minded tolerance* atau *savoir vivre* dalam menyikapi keberadaan kebudayaan asing yang hadir dalam segala bidang kehidupannya (Soekiman, 2014: 9).

Keberadaan Pemerintah Kolonial Belanda tidak dapat dilepaskan dari keberadaan konsep feodalisme yang sudah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat bumiputera. Ciri feodalisme dapat dilihat pada struktur hierarki masyarakat, yang terdiri atas para penguasa (raja-raja dan *priyayi*) dan rakyat petani, yang masih kuat melekat. Feodalisme yang sudah subur dalam alam pikiran masyarakat bumiputera, dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui perantaraan pejabat-pejabat bumiputera yang memperoleh ketaatan dan penghormatan dari masyarakat tanpa perlu diminta (Sutherland, 1983: 28). Kemudian, menjadi wajar, jika pemerintah Kolonial Belanda berusaha untuk menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin bumiputera. Karena dengan begitu, akan lebih mudah menjangkau dan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti kebijakan mereka.

Kehadiran orang-orang Eropa dalam kehidupan masyarakat Jawa memunculkan sebuah tatanan atau struktur sosial yang baru. Pergaulan yang terjadi antara orang-orang Eropa dan elite

bumiputera berpengaruh pada masuknya gaya hidup Barat ke dalam lingkungan istana. Pernyataan tersebut didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum masa Pemerintahan HB VIII, pengaruh budaya Barat yang mempengaruhi kebudayaan yang berkembang di Keraton Yogyakarta telah banyak terjadi, walaupun secara penerimaan masih diwarnai pro dan kontra dari berbagai kalangan di keraton.

Berdasar pada uraian di atas, permasalahan utama yang akan dibahas adalah tentang peristiwa Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan pemerintah kolonial Belanda pada masa pemerintahan HB VIII. Pada masa pemerintahan HB VIII, *Pisowanan agung*/ jamuan agung keraton untuk tamu-tamu kehormatan dari Belanda sering diselenggarakan. Beragam pertunjukan seni seperti *wayang wong*, tari, penyajian minuman alcohol, dan beragam jamuan makanan mewah diperuntukkan bagi tamu-tamu Eropa sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan. Penyelenggaraan seremonial kebudayaan diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis antara keraton dan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga aspirasi keraton dapat terpenuhi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis (Gottschalk, 1983: 32). Metode Sejarah terdiri atas empat langkah yang berurutan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. *Pertama*, heuristik atau pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang bersifat primer dan sekunder. Keduanya berguna untuk mendukung topik yang diambil oleh peneliti sejarah. *Kedua*, kritik sumber yang pada tahapan ini dilakukan kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan untuk memastikan otentisitas dan kredibilitas sumber tersebut. Setelah pengumpulan sumber, dilakukan pengujian sumber melalui kritik ekstern dan intern. *Ketiga*, interpretasi, yaitu kegiatan menetapkan hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hubungan kronologis dan sebab-akibat dengan melakukan imajinasi, dan analisis. Tahap ini perlu dilakukan karena fakta-fakta sejarah yang ditemukan masih tidak saling berhubungan, dan belum menunjukkan makna. *Keempat*, historiografi, adalah historiografi yaitu tahapan rekonstruksi atau penyusunan tulisan sejarah secara kronologis dan sistematis, sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh pembacanya. Sumber dalam artikel ini diperoleh dari beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Indonesia, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada (UGM), Pusat Kajian Makanan Tradisional Universitas Gajah Mada, *Jogja Library Center*, Balai Arkeologi Yogyakarta, Museum Widya Budaya Keraton Yogyakarta, dan Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Sumber yang didapatkan dari lembaga ini merupakan sumber primer yang berupa arsip surat-surat Sultan HB VIII terkait perintah untuk mempersiapkan penyambutan untuk tamu-tamu keraton dari Belanda, foto-foto dokumentasi sezaman yang menggambarkan tentang interaksi pihak Keraton Yogyakarta dengan pihak pemerintah kolonial Belanda yang diunduh dari situs KITLV <http://media-kitlv.nl/>, film dokumenter dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul *Kersanan Ndalem*, yang menceritakan tentang kuliner kesukaan sultan. Film dokumenter tersebut menggambarkan tentang perjamuan makan dan minum tamu Belanda oleh Keraton Yogyakarta sebagai sebuah bentuk diplomasi kebudayaan yang bertujuan untuk melancarkan kepentingan atau aspirasi dari pihak keraton. Untuk melengkapi sumber-sumber tersebut dilengkapi juga dengan sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan *abdi dalem* maupun kerabat keraton yang mengetahui cerita tentang hubungan keraton dengan Belanda.

Latar Belakang Pelaksanaan Diplomasi Kebudayaan di Keraton Yogyakarta

Diplomasi kebudayaan bukan sebuah jalan yang ditempuh keraton tanpa didasari berbagai peristiwa yang mendahuluinya. Pelaksanaannya merupakan bentuk preventif yang paling halus untuk menciptakan situasi politik yang stabil antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda. Konflik-konflik yang terjadi antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda mendasari terlaksananya bentuk upaya kompromi yang terkesan lunak terhadap kekuasaan pemerintah kolonial, yaitu melalui serangkaian kegiatan seremonial kebudayaan.

Konflik yang dianggap mengawali sejarah panjang upaya melawan dominasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda adalah sebuah peristiwa yang dikenal dengan *geger sepoy/sepehi* yang terjadi pada 20 Juni 1812. Peristiwa ini merupakan penyerbuan pasukan Inggris ke Keraton Yogyakarta yang disebabkan oleh sikap dan pilihan politik HB II yang condong kepada upaya pemberontakan sehingga pascakeraton berhasil diduduki, HB II dibawa ke Batavia untuk menerima keputusan peradilan yang menyatakan bahwa ia harus menjalani pembuangan di Pulau Penang (Carey, 2013: 69; Marihandono, 2008: 34). Tahta Kesultanan selanjutnya berada di tangan HB III yang dikenal juga sebagai sultan raja. Pada masa pemerintahannya disepakati sebuah kontrak politik yang mengharuskan sultan untuk mengakui kedaulatan Inggris diikuti dengan pelepasan pengawasan atas daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang, Grobogan (Setiono, 2000: 172). Pada masa pemerintahannya pula, tepatnya pada 17 Maret 1813 lahir kerajaan baru, yaitu Pakualaman dengan wilayah sebagian dari Kabupaten Kulon progo, dipimpin oleh Pangeran Notokusumo (Putra dari HB I) yang kemudian bergelar K.G.P.A. Paku Alam I (Setiono, 2000: 180). Peristiwa ini menggoncang wibawa keraton karena keraton berhasil diduduki oleh pasukan Inggris, sultan ditangkap, dan banyak dari harta dan pusaka keraton yang dijadikan rampasan perang.

Namun demikian, konflik sengit tidak hanya berhenti di situ, bahkan berlanjut hingga belasan tahun setelahnya, terakumulasi menjadi sebuah ledakan perlawanan yang sangat mengancam kekuasaan Belanda di kemudian hari. Perlawanan tersebut datang dari putra sultan raja sendiri yaitu Pangeran Diponegoro. Bertumbuh di lingkungan keraton yang ketika itu didominasi oleh intervensi Belanda, membuat Diponegoro memiliki kebencian terhadap situasi lingkungan keraton yang berubah menjadi semakin tidak terkendali akibat pengaruh kebudayaan Barat. Hal ini diperparah lagi pascamangkatnya Sang Ayah, di mana situasi kesultanan menjadi tidak stabil karena posisi putra mahkota diserahkan kepada adiknya, Gusti Raden Mas Ibnu Jarot (1804-1823), yang ketika itu harus mengemban tahta kesultanan pada umur 10 tahun. Pangeran Diponegoro menjabat sebagai salah satu wali raja yang bertugas sebagai penasihat HB IV dalam pengambilan kebijakan, namun dalam berbagai momentum keberadaannya dan nasihat yang diberikan kepada adiknya tidak membawa perubahan terhadap situasi keraton yang dianggap semakin memprihatinkan. Semua kekecewaan yang tumpang tindih mencapai puncaknya ketika terjadi insiden pancang/*anjir* sebagai tanda akan dibuat jalan baru yang melewati tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini menjadi penyebab pecahnya perang selama kurun waktu lima tahun yang dianggap menguras kas Belanda, kemudian mendorong kebijakan *Cultuur Stelsel* diberlakukan sebagai bentuk bayaran atas dana yang dikucurkan selama perang panjang tersebut (Wawancara dengan KRT. Rinta Iswara, 24 November 2016).

Pascaperang Diponegoro berakhir dan mengalami kekalahan, sebagai kompensasi pascaperang wilayah kesultanan yang terdiri dari Mataram, Kedu, Bagelen, Banyumas,

Semarang, Rembang, Pati, Magetan, Maospati, Caruban, Trenggalek, dan Pasuruan diambil alih oleh Pemerintah Kolonial Belanda menyisakan wilayah yang kita kenal sebagai Yogyakarta saat ini. Selanjutnya, upaya untuk menghindari friksi terus dilakukan untuk menghindarkan keraton dari lebih banyak kerugian dan intervensi berlebihan dari Pemerintah Kolonial Belanda, termasuk dengan mengupayakan diplomasi menggunakan media kebudayaan.

Saluran-Saluran Diplomasi Kebudayaan Masa HB VIII, 1921-1939

Proses diplomasi kebudayaan yang tampak dari serangkaian agenda seremonial kebudayaan di keraton dapat dianggap sebagai upaya melunak untuk bertahan. Sebagai sosok yang visioner, HB VIII menyadari bahwa penerusnya akan menghadapi zaman yang jauh berbeda dengannya dan para leluhurnya, sehingga pola pendidikan yang dilakukannya tidak biasa. Putra-putranya dititipkan di keluarga Belanda supaya bisa mempelajari hidup mandiri dan disiplin, dengan begitu diharapkan penerusnya nanti akan menjadi pribadi yang kritis dalam menghadapi situasi keraton yang didesak kekuatan represif dan sarat dengan intervensi oleh pihak Kolonial Belanda.

Agenda seremonial kebudayaan yang melibatkan pihak Pemerintah Kolonial Belanda dapat dianggap sebagai terobosan baru dalam menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan keraton sekaligus menjaga situasi tetap aman dan terkendali, sehingga dapat dikatakan cara yang dipilih untuk menyalurkan aspirasi pada masa pemerintahan HB VIII tidak lagi bersifat frontal. Perjamuan makan menjadi simbol dari kecenderungan kekuasaan, tradisi keraton sekaligus bentuk baru dari komunikasi politik. HB VIII menerima dan menjadikan pola konsumsinya disesuaikan dengan selera dan gaya Barat sebagai bentuk meminimalisir potensi konfrontatif antara rakyat Yogyakarta dan pihak Kolonial Belanda. Rangkaian kegiatan makan menjadi simbol politik untuk menunjukkan secara samar penerimaan dan kekuatan resistensi atas kolonialisme (Wawancara dengan Heri Priyatmoko, 6 Juni 2016).

Selain itu, intensitas perjamuan makan yang meningkat pada masa HB VIII merupakan bentuk upaya sultan untuk menjaga putra mahkota, Gusti Dorodjatun, yang kemudian akan bergelar HB IX, dari pengaruh pihak kolonial. Kondisi sultan yang ketika itu mulai sakit-sakitan dianggap sebagai faktor pendorong peningkatan perjamuan makan dan pentas hiburan untuk para tamu Belanda. Romo Tirun (cucu HB VII) berpendapat bahwa seremonial-seremonial yang terus dilakukan itu akan mampu mengalihkan perhatian pihak kolonial dari situasi di lingkungan keraton. Menurut Romo Tirun, ketika itu Kemerintah Kolonial Belanda sering berkunjung ke keraton pagi-pagi untuk menyaksikan latihan tari kerajaan di *emper* bangsal kencana. Di sana keraton juga menyajikan aneka hidangan Eropa yang diolah dengan cara Jawa. Oleh karena itu, pada zaman HB VIII banyak resep baru keraton yang lahir.

Secara garis besar upaya diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh keraton dapat digolongkan sebagai bentuk ekshibisi, yaitu menampilkan konsep-konsep atau karya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai sosial dan ideologi dari suatu bangsa kepada bangsa lain. Bentuk diplomasi ini mengacu pada pengertian seremonial, protokoler sesuai dengan konvensi atau adat yang berlaku dan bentuk negosiasi antara dua belah pihak untuk saling memperkenalkan, mengakui, menghormati, dan menghargai kebudayaan masing-masing bangsa tersebut (Warsito, 2014: 21). Saluran-saluran diplomasi kebudayaan di Keraton Yogyakarta meliputi seni tari, seni dramatari/*wayang wong*, seni musik, seni bangunan/arsitektur hingga kuliner. Semua bidang seni dan budaya keraton tersebut nantinya akan membentuk sebuah rangkaian kegiatan seremonial yang megah dan mewah.

Fakta bahwa kesenian dan kebudayaan keraton dipergunakan sebagai media diplomasi tentunya menyoroti fakta bahwa pada masa pemerintahan HB VIII, aspek seni pementasan

keraton yang memperoleh perhatian sultan. Berkaca pada hal tersebut, dapat disimpulkan adanya upaya untuk membuat pihak Belanda terlena dengan kesenangan-kesenangan yang menarik perhatian mereka lewat parade seni pertunjukan keraton yang megah, sehingga hubungan antara keraton dan residen sebagai perwakilan pemerintah Belanda tetap terjaga baik. Meski pengaruh dan intervensi Belanda masih terus mengungkung pergerakan sultan dan keraton, kesenian mampu tampil sebagai bagian dari kekayaan dan atraksi kebudayaan yang gemilang dan membanggakan. Seperti misalnya, prosentase pementasan *wayang wong* meningkat pada masa pemerintahan HB VIII. *Wayang wong* dirancang lebih megah dengan jumlah durasi yang panjang dan banyak pemain.

Pada masa HB VIII, proses pembaratan dalam beragam aspek dalam kehidupan keraton menjadi perhatian. Hal ini juga merambah pada konsepsi seni pertunjukkan yang pada masa pemerintahan HB VIII mencapai masa gemilangnya. Menurut catatan Groneman, pada akhir abad ke-19, Korps musik prajurit Keraton Yogyakarta terdiri dari tiga macam ensambel yaitu korps musik yang memainkan instrumen Jawa dan Eropa, korps musik yang memainkan instrumen Eropa, dan korps musik yang memainkan instrumen Jawa saja. Groneman juga menyebutkan bahwa semua pemain musik itu adalah prajurit musikus Jawa (abdi dalem Prajurit-Musikan) yang memakai seragam ala militer Eropa abad ke-19 (Sumarsam, 2003: 96).

Meskipun langkah-langkah pembaruan ini bukanlah sesuatu yang baru dilakukan oleh pihak keraton namun perhatian untuk melengkapi fasilitas atau media yang menunjang jalannya pagelaran atau pementasan seni di keraton. Upaya untuk menunjukkan adanya toleransi terhadap hadirnya unsur Belanda dalam pagelaran seremonial kebudayaan di keraton dapat diartikan sebagai bentuk penerimaan dan apresiasi terhadap kenyataan-kenyataan politik pada masa itu. Pembauran melalui media kesenian diharapkan mampu memberikan ruang gerak yang luas dalam menimbulkan perasaan keterikatan. Hal-hal tersebut tidak langsung menjamin keharmonisan hubungan antara keraton dan Pemerintah Belanda namun memperhatikan hal-hal kecil terkait kesenangan dan kebiasaan Barat diharapkan mampu menciptakan kesan bersahabat, sehingga mediasi terhadap masalah-masalah yang akan timbul di masa depan akan dapat dengan mudah dilakukan.

Hambatan dan Hasil Diplomasi Kebudayaan

Konsep perubahan yang terjadi di lingkungan Keraton Yogyakarta didorong oleh upaya untuk mendukung perkembangan dan kemajuan keraton sendiri. Keraton sebagai simbol pusat penegakan adat harus berkompromi dengan nilai-nilai barat yang masuk ke dalam lingkungan keraton. Hal ini seharusnya diimbangi dengan pola pikir bahwa adat harus dapat disikapi dengan lebih fleksibel dalam beberapa konteks karena konsep adat bukan untuk membantu perkembangan zaman, tetapi harus mampu tumbuh dan berkembang mengikuti zaman. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami juga bahwa *kasultanan* harus mengalami pembaruan atau dapat mempertahankan pranata-pranata adat yang lama, dengan penyesuaian terhadap pranata-pranata adat tersebut.

Dorongan untuk berkompromi terhadap nilai-nilai Barat adalah bentuk nyata dari upaya bersikap fleksibel menyikapi perbedaan budaya antara dua bangsa yang berbeda. Konsep penerimaan tamu oleh pihak keraton menunjukkan bahwa Keraton Yogyakarta sudah menjalankan adab atau tata cara Jawa dalam prosesnya. Suguhan dan pentas budaya yang megah digelar semata agar tamu Belanda yang hadir dalam agenda kunjungan tersebut dapat merasa kersan dan terkesan. Upaya untuk meninggalkan kesan yang mendalam dan menarik adalah

bentuk ekshibisi atau pameran kebudayaannya sendiri di mata tamu Belanda. Meski ruang gerak keraton terbatas, namun dengan ruang yang ada upaya diplomasi bisa dimaksimalkan.

Dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan di Keraton Yogyakarta ditemui beberapa hambatan, yaitu *pertama*, dualisme raja yang bertujuan untuk mengamankan suksesi tahta. Sultan sebagai tokoh utama dalam jalannya pemerintahan di keraton dituntut untuk dapat memainkan peranan ganda sebagai seseorang yang mampu mengayomi dan melindungi kawulanya, namun juga harus bertindak sesuai dengan perjanjian politik yang telah ditandatangani dengan pihak pemerintah kolonial Belanda. Peranan ganda itu harus dapat diwujudkan dengan melindungi kepentingan rakyat, namun di sisi lain juga harus dapat memanfaatkan kewibawaan secara tradisional dan mempertahankannya sesuai dengan kemauan Belanda. Sikap dualisme ini tidak jarang memunculkan kritikan dari kaum pergerakan. Kaum pergerakan memandang konsep feodalisme yang tumbuh subur di Keraton Yogyakarta sebagai sebuah konsep yang kaku dan lebih condong pada kekuasaan kolonial. Kenyataannya ada perjanjian politik yang mengikat siapapun raja yang bertahta. Sehubungan dengan tekanan politik penguasa kolonial yang mengikat kuat, keraton berada dalam posisi sulit, yang berimbas pada sultan yang harus menerima saran-saran dari gubernur (Wawancara dengan KRT. Rinta Iswara, 24 November 2016).

Kedua, sultan dan alokasi anggaran untuk agenda seremonial. Sultan diharuskan untuk menyesuaikan kebijakan yang akan dicanangkannya dengan anggaran yang tersedia. Pembatasan anggaran ini merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati sendiri oleh HB VIII ketika akan naik tahta menjadi sultan. Selama masa HB VIII bertahta, keuangan keraton dipegang oleh pemerintah. Sultan hampir tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan keuangan seperti halnya HB VII. Bahkan keberadaan dewan keraton yang dibentuk oleh pemerintah sendiri hampir diabaikan, karena ketika perundingan tentang anggaran ini dilakukan, sultan tidak hanya berunding dengan dewan keraton tapi juga wajib berunding dengan sebuah panitia anggaran yang diketuai oleh gubernur. Kekayaan sultan dibatasi dan ditentukan oleh pemerintah, sehingga dapat dipahami bahwa setiap kebijakan yang diberlakukan oleh sultan terbentur oleh anggaran yang ada. Pembatasan anggaran ini harus ditanggung sendiri oleh sultan, yang dalam waktu bersamaan harus bisa mengambil sikap yang tidak merugikan diri sultan sendiri. Sultan harus tetap berdiri tegak dan tidak mengalami kelemahan ekonomi meski harus menghadapi pembatasan anggaran (Wawancara dengan Murdjiati Gardjito, 3 Juni 2016).

Kebutuhan yang semakin meningkat sebagai penyelenggara rangkaian jamuan seremonial keraton dan menghadapi pembatasan keuangan mendorong sultan untuk berhutang, kreditur sultan adalah para pengusaha perak Kotagede. Sumber lain menyatakan pula tentang sultan yang berhutang dengan patihnya sendiri pada 1928. Melihat angka tahun dalam keterangan tersebut, dapat ditarik fakta bahwa pada tahun tersebut diselenggarakan sebuah pentas *wayang wong* yang berdurasi selama tiga hari yang tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Kemungkinan besar itu menjadi faktor pendorong mengapa HB VIII sampai berhutang pada patihnya sendiri. Kemudian dapat dipahami bahwa faktor yang mendorong sultan untuk berhutang pada para pengusaha, didasari oleh rasa tanggung jawab seorang raja sebagai simbol penjaga budaya yang dituntut untuk menyanggupi penyelenggaraan rangkaian seremonial keraton yang termasuk atraksi kebudayaan keraton yang mewah dan megah (Wawancara dengan Pudji S., 5 Mei 2017).

Ketiga, idealisme keraton sebagai pusat kebudayaan Jawa. Keberadaan keraton sebagai pusat budaya Jawa yang luhur dianggap selalu sebagai tolok ukur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di luar lingkungannya. Kebudayaan yang dikenal ketika itu merupakan *patronase* atau monopoli pihak istana. Sebagaimana halnya yang berlaku di Keraton Yogyakarta, kesenian keraton yang agung pada awalnya hanya dapat dipelajari atau dinikmati oleh kalangan sendiri, dapat dianggap pula sebagai monopoli kaum ningrat. Kesenian keraton yang agung dan sakral

berpusat pada sosok seorang raja dengan segenap atribut yang melekat padanya. Atribut yang dimaksud adalah segenap pihak yang terlibat dalam terselenggaranya sebuah atraksi kebudayaan. Bahkan tidak jarang atribut atau kelengkapan pagelaran kesenian yang bukan benda mati seperti orang-orang yang dianggap memiliki kepandaian luar biasa sekaligus kemampuan ghaib dikumpulkan oleh raja sebagai sebuah legitimasi untuk memantapkan kekuasaan seorang raja (Suyanto, 2002: 63). Pada masa HB VIII, pentas *wayang wong* mencapai masa gemilangnya, dapat dilihat dari angka pementasan yang meningkat drastis apabila dibandingkan dengan masa sultan-sultan sebelumnya. Dari indikator tersebut diperkirakan bahwa alokasi dana yang dipusatkan untuk penyelenggaraan pagelaran *wayang wong* dapat digolongkan sangat mahal. Fakta tersebut menegaskan bahwa untuk menjadi seorang simbol penjaga kebudayaan, HB VIII telah mengerahkan upaya yang besar. Pertunjukan *wayang wong* di keraton yang megah memiliki beragam tujuan, ada yang benar-benar dipergunakan sebagai penyajian estetis untuk dinikmati oleh sultan bersama keluarga dan para tamu undangan, ada yang dipergunakan sebagai penyambutan peristiwa-peristiwa penting dari Pemerintah Belanda, dan dipergunakan untuk merayakan hari ulang tahun sultan (Soedarsono, 2000: 39).

Pelaksanaan diplomasi tidak selalu berbentuk perjanjian untuk mengatasi sengketa tertentu, namun dapat berupa unjuk kebesaran kreasi kebudayaan suatu negara atau bangsa kepada bangsa yang lain. Diplomasi kebudayaan dapat juga dimaksudkan untuk menciptakan *social harmony* antarbangsa, agar tidak terjadi friksi dan urusan antara keduanya bisa berjalan lancar, demikian juga antar keduanya dalam berinteraksi saling kooperatif satu sama lain. HB VIII dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan mencoba untuk mencapai suatu kondisi yang kondusif melalui sebuah parade kebudayaan.

Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang mengacu pada pengalaman para pendahulunya, yang mengalami beragam intrik politik akibat intervensi pemerintah kolonial yang terjadi tanpa bisa dikendalikan. Berkaca dari pengalaman pemerintahan sultan sebelumnya yang tidak selalu berjalan mulus, HB VIII memfokuskan diri untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Perilaku bersahabat ditunjukkan dengan upaya mengakrabkan hubungan kedua pemerintahan melalui penyelenggaraan agenda saling kunjung dengan rangkaian acara yang menampilkan penerimaan terhadap corak atau pengaruh budaya Barat. Upaya tersebut tidak semata menghilangkan corak kebudayaan asli Jawa yang menjadi identitas keraton, dalam prosesnya proses pembauran kebudayaan menjadi *output* yang dihasilkan bersamaan dengan cita-cita HB VIII untuk mewujudkan kemakmuran dan keamanan kerajaan. Terbukti dari tercapainya situasi yang jauh dari friksi antara keraton dan Pemerintah Kolonial Belanda selama masa pemerintahannya dan keberhasilannya dalam mengantarkan puteranya, HB IX ke tahta sultan melanjutkan estafet kepemimpinannya.

Simpulan

Harapan keraton untuk mencapai sebuah kondisi hubungan politik yang stabil pada masa HB VIII tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang terjadi pada masa pemerintahan sultan sebelumnya. Pola perjuangan yang bersifat agresif berujung pada banyak kondisi yang merugikan bagi keraton sendiri, sehingga dengan berjalannya waktu pola perjuangan kepentingan berganti dari pola agresif menjadi pola yang kooperatif dengan catatan khusus. Fakta bahwa HB VIII tampak lebih kooperatif juga menimbulkan pro dan kontra, karena dalam pelaksanaan rangkaian agenda diplomasi kebudayaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kontribusi berbagai pihak dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada pihak-pihak yang kurang berkenan dengan pola perjuangan gaya baru yang dicanangkan oleh HB VIII. Perjanjian politik yang ditandatangani sultan ketika

pelantikannya mengikat dan mendorong sultan untuk membuat kebijakan yang proBelanda namun, di sisi lain sultan juga dituntut untuk tetap membela kepentingan kawulanya.

Diplomasi kebudayaan merupakan salah satu cara yang dilakukan Keraton Yogyakarta dalam menghadapi intervensi politik Pemerintah Kolonial Belanda. Intervensi politik Belanda dalam lingkungan keraton berdampak pada perkembangan kebudayaan maupun pola interaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak. Intensitas perjamuan yang meningkat pada masa pemerintahan HB VIII dapat dipandang sebagai indikasi adanya kebutuhan untuk menjaga hubungan politik antara keraton dan Pemerintah Kolonial Belanda supaya tetap dalam kondisi yang stabil. Jalan diplomasi kebudayaan ini secara tidak langsung memberikan sebuah solusi yang diharapkan, namun pada kenyataannya pola diplomasi ini dipergunakan dan dipersiapkan sedemikian rupa sebagai salah satu solusi yang paling mungkin dilakukan ketika ruang gerak keraton dibatasi oleh perjanjian politik yang mengikat setiap tindakan maupun pilihan kebijakan yang berada dalam kendali sultan.

Penggunaan saluran-saluran kebudayaan dalam pelaksanaan diplomasi tidak dapat dilepaskan dari problematika atau hambatan, begitupun dari segi efektivitas, tidak ada jaminan bahwa setelah banyak upaya menyelenggarakan rangkaian agenda seremonial, akan mempermudah dan melancarkan tuntutan-tuntutan keraton terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Namun demikian, langkah yang diambil keraton dengan memanfaatkan ranah budaya sebagai ruang bebas untuk menyampaikan aspirasi terhadap intervensi Pemerintah Kolonial Belanda perlu diapresiasi. Fakta bahwa keraton memanfaatkan ranah bebas yang ada untuk berekspresi secara berbudaya sekaligus ajang unjuk diri sebagai pusat kebudayaan Jawa yang agung dapat digolongkan sebagai bentuk perjuangan gaya baru yang gemilang.

Referensi

- Budi, Noor Sulistyono, dkk. (1997). *Tradisi Makan dan Minum di Lingkungan Keraton Yogyakarta*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya.
- Carey, Peter (2013). "Daendels dan ruang Suci Jawa 1808-1811: Hubungan politik, seragam, Jalan Raya Pos dan Korupsi", (*Nijmegen: Uitgeverij Vantilt/Stichting Daendels*, 2013) disajikan sebagai makalah dalam kuliah khusus tentang Daendels (*Daendelslezing*) untuk Yayasan Daendels (*Stichting Daendels*) di Felix Meritis Keizersgracht 324, Amsterdam.
- Gottschalk, Louis (1983). *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lombard, Denys (2000). *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, Fadly (2011). *Rijstaffel: Budaya Kuliner Di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiono, Andi, dkk. (2000). *Kerangka dasar Ensiklopedi Budaya Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan untuk Indonesia (YUI).
- Soedarsono (2000). *Masa Gemilang dan Memudar Wayang Wong Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Terawang Press.
- Soekiman, Djoko (2000). *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

- Sumarsam (2003). *Gamelan, Interaksi Budaya dan Perkembangan Musikal di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutherland, Heather (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (The Making of a Bureaucratic Elite)*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Suyanto, Isbodroini (2002). "Faham kekuasaan Jawa: Pandangan Elit kraton Surakarta dan Yogyakarta" Disertasi program doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Warsito, Tulus dan Wahyuni Kartikasari (2007). *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Informan

Heri Priyatmoko
KRT. Rinta Iswara
Murdjiati Gardjito.
Pudji